



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Beringin Telp./Fax. (0742) 22402 / 323308 Kode Pos 36513
KUALA TUNGKAL

RENCANA KERJA TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirumuskan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019. Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

2018

KEPALA BPPRD,

YON HERI, SP.ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	27
3.3. Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V PENUTUP.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD, selanjutnya perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal

Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Rencana Kerja Tahun 2019”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran Program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya Visi, Misi, dan Program Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menjadi Acuan Umum dalam menentukan Program dan Kegiatan yang akan dibahas dalam Rangkaian dan Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten secara berjenjang sehingga dapat lebih terjamin dan mempermudah pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 melaksanakan 5 Program (4 Program Pendukung dan 1 Program Utama) dari anggaran yang direncanakan terealisasi (92,70%) dengan capaian fisik 98,76%.

Program pendukung yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari anggaran yang direncanakan terealisasi sebesar 88,90% dengan capaian fisik 99,81%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur dari anggaran yang direncanakan terealisasi 96,95% dengan capaian fisik 97,78%, hal ini disebabkan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor ada paket kegiatan yang tidak dilaksanakan karena masih dalam kondisi baik.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari anggaran yang direncanakan terealisasi sebesar 80% dengan capaian fisik 95%, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dana yang mendukung untuk mengikuti Bimtek sehingga pelaksanaan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dari anggaran yang direncanakan terealisasi sebesar 99,78% dengan capaian fisik 100%

Sedangkan Program Utama yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017 yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari anggaran yang direncanakan terealisasi sebesar 92,49% dengan capaian fisik 98,62%.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
- Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	100 %	74,38 %	100 %	98,25 %	98,25%	100 %	54,53 %	54,53%	
- Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor		Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	5 Paket	0 Paket	5 Paket	0%	0%	0	5 Paket	100%	
- Penataan Administrasi Barang Inventaris Kantor		Tercedainya data administrasi barang inventaris kantor	36 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0%	0%	12 Bulan	12 Bulan	33%	
Peningkatan Disiplin Aparatur											
- Pengadaan Pakian Dinas Beserta Perlengkapannya		Terlaksananya pembelian pakian dinas dan seragam untuk PNS, TKS/TKK	1.158 Stel	223 Stel	210 Stel	100%	100%	240 Stel	673 Stel	58%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
- Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal (Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan / Kegiatan TA. 2016)		Terlaksananya pendididkan dan pelatihan	100 %	100 %	100 %	95%	95%	100 %	59 %	59%	
- Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2		Meminimisir permasalahan PBB-P2 yang telah terjadi di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa	1 Kali	100 %	0 %	0 %	0%	0	0 %	100%	
- Bimtek Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (Kegiatan TA. 2016)		Membentuk kualitas SDM di desa/ kelurahan yang cukup dalam memulata CP PBB-P2	100 %	100 %	0 %	0%	0%	0 %	100 %	100%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
- Penyusunan Laporan Penyerimaan Daerah (Kegiatan TA. 2016)		Laporan penyerimaan daerah yang akurat	12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0%	0%	0 Bulan	12 Bulan	100%	
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		Terlaksananya penyusunan laporan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah	48 16 Bulan Triwulan	12 Bulan 4 Triwulan				12 Bulan 4 Trw	24 Bulan 8 Triwulan	50% 50%	
- Rekonsiliasi penyerimaan SKPD pengelola pendapatan daerah		Terlaksananya rapat rekonsiliasi penyerimaan daerah dengan SKPD	48 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	24 Bulan	50%	
- Rakoesiliasi penyerimaan PBB-P2 dan BPHHTB		Terlaksananya rekonsiliasi penyerimaan PBB-P2 dan BPHHTB	4 Kali	2 Kali				2 Kali	4 Kali	100%	
- Penyusunan perencanaan program kerja dinas		Terlaksananya penyusunan Kenja dan REKA SKPD	4 8 Dok renja 8 Dok REKA	1 2 Dok renja 2 Dok REKA				1 2 Dok renja 2 Dok REKA	2 4 Dok renja 2 Dok REKA	50% 50%	
- Penyusunan perencanaan strategis		Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD	1 Dok	1 Dok				1 Dokumen	2 Dok	100%	
- Pengolahan data penyerimaan pendapatan daerah		Tersedianya data penyerimaan pendapatan daerah yang akurat dan akurat	36 Buku lap					12 Buku lap	12 Buku lap	33%	
- Penatausahaan dan Pembakuan penyerimaan Pajak dan Retribusi Daerah		Terlaksananya administrasi yang teratur dan tertib	36 Bulan		0 %	0%	0%	12 Bulan	12 Bulan	33%	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
	- Koordinasi peningkatan penerimaan dana perimbangan	Terapainya target penurusan dana perimbangan	1.108.600.000.000	1.800.000.000.000	-	-	0%	0	1.000.000.000.000	95,41%	
	- Evaluasi penerimaan PBB-P2	Terlaksananya penurusan PBB P2	28.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	4.808.262.068	100%	5.500.000.000	16.500.000.000	58%	
	- Verifikasi data objek dan subjek BPHTB dan PBB-P2	Data objek dan subjek BPHTB yang valid dan akurat	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100%	0 %	0 %	100%	
	- Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB-P2	Terlaksananya verifikasi data objek dan subjek PBB-P2	20.000 OP	0 OP	0 OP	0 OP	0%	6000 OP	6000 OP	30%	
	- Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB	Terlaksananya verifikasi data objek BPHTB	2.100 OP	0 OP	0 OP	0 OP	0%	700 OP	700 OP	33%	
	- Evaluasi dan Pelaporan pendapatan dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, DAU dan DAK	Tersedianya buku laporan penerimaan dana perimbangan	12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0%	0	12 Bulan	100%	
	- Koordinasi peningkatan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil dari provinsi	Tercapainya target penerimaan DBH pajak dan DBH provinsi	28.000.000.000	33.848.239.999	0	0	0%	0	33.848.239.999	120,89%	
	- Koordinasi peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah	Tersedianya buku laporan penerimaan dana bagi hasil pajak	100 %	100 %	0 %	0 %	0%	0 %	100 %	100%	
	- Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	Terlaksananya Koordinasi peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	16 Kali	16 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	8 Kali	50%	
	- Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	Terlaksananya evaluasi pelaporan pendapatan daerah	48 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	50%	
	- Laporan Koordinasi Intensifikasi PBB-P2	Terlaksananya Rapat Koordinasi intensifikasi PBB-P2	4 Kali	0 %	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	2 Kali	50%	
	- Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya koordinasi pendapatan daerah	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	50 %	50%	
	- Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersedianya data penerimaan pendapatan daerah yang akurat dan akurat	12 Buku lap	12 Buku lap	12 Buku lap	12 Lap	100%	12 Buku lap	12 Buku lap	50%	
	- Pendataan dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya pendataan WP/WR	28.541 WP/WR	3.500 WP/WR	6.000 WP/WR	6.000 WP/WR	100,00%	6.000 WP/WR	15.500 WP/WR	54,31%	
	- Penilaian dan Penetapan Pajak / Retribusi Daerah	Terlaksananya penyempurnaan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah	SPTPD/ SKPD/ SKRD 47.941	SPTPD/ SKPD/ SKRD 7.500	10.000 WP/WR	10.000 WP/WR	100,00%	10.000 SKPD/ SKRD	SPTPD/ SKPD/ SKRD 27.500 SKRD	57,36%	
	- Penagihan pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah	48.241 WP	7.500 WP	10.000 WP	10.000 WP	100%	10.000 WP	27.500 WP	57%	

1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10-(9+7/9)	11-(10/4)	12
-	Pendataan dan pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2	Terlaksananya pendataan wajib pajak PBB-P2	25.666 OP	6.000 OP PBB-P2	7.000 OP PBB-P2	5.666 OP	100%	6.000 OP	17666 OP	69%	
-	Pengelolaan data sistem informasi PBB-P2	Terlaksananya pengelolaan data sistem informasi PBB-P2	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%	
-	Peneriksaan dan Pengendalian pajak daerah	Terlaksananya pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah	100 %	100 %	100 %	95 %	95%	100 %	50 %	50%	
-	Penyempurnaan dan Pengalihan PBB-P2	Penyempurnaan SPPT dan pengalihan PBB-P2 BPHTB	530.161 SPPT	110.000 SPPT	109.961 SPPT	109.961 SPPT		110.200 SPPT 700 BPHTB	329.922 SPPT	60%	
-	Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah (HO)	Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi Komputersasi	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%	
-	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Kegiatan T.A. 2016)	Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi Komputersasi	100 %	100 %	100 %	100 %	0%	100 %	25 %	25%	
-	Penyusunan target penertarikan pendapatan daerah	Terlaksananya target penertarikan pendapatan daerah	8 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	0%	2 Kali	4 Kali	50%	
-	Peningkatan Jaringan Komputersasi Perpajakan	Terlaksananya peningkatan jaringan komputersasi perpajakan	100 %	100 %	100 %	92,00 %	0%	100 %	92 %	92%	
-	Komputersasi pajak daerah	Terlaksananya peningkatan jaringan komputersasi perpajakan	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	33 %	33%	
-	Kajian dan Promosi peningkatan pendapatan daerah	Terlaksananya Kajian Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	25 %	25%	
-	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	25 %	25%	
-	Peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah	Terlaksananya peningkatan kemampuan pengelola pajak	100 %	100 %	100 %	80,00 %	80%	100 %	25 %	25%	
-	Sosialisasi Pajak Daerah (Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah terhadap RP/PPR / Kegiatan T.A. 2016)	Terlaksananya sosialisasi pajak daerah	3.400 WP	500 WP	650 WP	650 WP	100%	700 WP	1.850 WP	54,41%	
-	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	Terlaksananya penyusunan produk hukum di bidang pajak daerah	100 %	0 %	100 %	100,00 %	100%	100 %	50 %	50%	
-	Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Tersapainya penertarikan pajak dan retribusi daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	0	0	100%	
-	Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya kegiatan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Kali 6 Raker	0 %	0 %	0 %	0%	2 Kali Raker	2 kali Raker	33%	
-	Ekstensifikasi dan Identifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan identifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	1.630 OP	0 OP	0 %	0 %	0%	500 OP	500 OP	31%	
-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	0	12 Bulan	100%	
-	Rekonsiliasi Penertarikan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah	Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penertarikan Daerah dengan SKPD	12 Bulan	0 Kali	12 Bulan	12 Bulan	100%	0	12 Bulan	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(3+7+9)	11=(10/4)	12
-	Rekomendasi Penerimaan PBB P2 dan BPHHTB	Terlaksananya Rekomendasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHHTB	2 Kali	0 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	0	2 Kali	100%	
-	Penyusunan perencanaan program kerja dinas	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja dan RKAs SKPPD	1 Dok menp 2 Dok RKA	0 Dok menp 0 Dok RKA	1 Dok menp 2 Dok RKA	1 Dok menp 2 Dok RKA	100% 100%	0	1 Dok menp 2 Dok RKA	100% 100%	100%
-	Penyusunan perencanaan strategis	Terlaksananya penyusunan Rencana SKPPD	1 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	0 Dok	1 Dok	100%	100%
-	Pelayanan mobil keliling PBB-P2	Terlaksananya pelayanan mobil keliling PBB-P2	32 Keo 256 Kali	8 % 64	8 % 64	8 % 64	100%	8 Keo 64 Kali	24 % 192	75%	75%
-	Penyusunan statistik pendapatan daerah	Tersampainya informasi data statistik pendapatan daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	0%	100 %	100 %	33%	33%
-	Pelayanan dan Pengadministrasian benda berharga	Terlaksananya pelayanan dan pengadministrasian benda berharga	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0%	12 Bulan	24 Bulan	50%	50%
-	Optimalisasi pelayanan pembayaran pajak/ retribusi daerah	Peningkatan pelayanan pajak/ retribusi daerah	12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0%	0	12 Bulan	100%	100%
-	Optimalisasi pajak dan retribusi daerah	Tercapainya peningkatan penerimaan PAD	4 Kali Rakor	100 %	0 %	0 %	0%	0	100 %	100%	100%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan											
-	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Kegiatan TA 2016)	Terperluhnya data administrasi pegawai	12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0%	0 Bulan	12 Bulan	100%	100%
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan											
-	Klarifikasi dan Pertimbangan Hakam Terhadap Pajak Daerah (Kegiatan TA 2016)	Terlaksananya pendataan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	100 %	0 %	0 %	0%	0 %	100 %	100%	100%

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	%		0,21	2	5,1	5,3	22,46	2	5,1	5,3	Target peningkatan penerimaan PAD Tahun 2017 sebesar 0,21%, sedangkan untuk realisasi penerimaan PAD Tahun 2017 sebesar 22,46% dengan Capaian Kinerja 10,695%.			
2	Transparasi, Kecepatan, Kemudahan, Akuntabilitas Pelayanan Kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	%		90	95	95	100	89,62	95	95	100	Pajak daerah pada tahun 2017 terealisasi sebesar 106,63% sedangkan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD (ret.gangguan / HO) terealisasi sebesar 72,80%, jadi transparan, kecepatan, kemudahan, akuntabilitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah terealisasi rata-rata sebesar 89,62% dengan capaian kinerja 99,58%.			
3	Peningkatan Kompetensi Pegawai di Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Kinerja Organisasi	%		10	10	15	15	12,63	10	15	15	Peningkatan kompetensi pegawai di bidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi pada tahun 2017 dengan target 10% terealisasi sebesar 12,63% dengan capaian kinerja 126,30%.			
4	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Memenuhi Kewajibannya Secara Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	%		85	85	90	95	89,62	85	90	95	Indikator kinerja ini dapat diukur dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017 dengan Realisasi sebesar 89,62% dengan capaian kinerja 112,03%.			
5	Pelaksanaan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	%		90	95	95	100	100	95	95	100	Pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah untuk mendapatkan laporan penerimaan daerah yang valid BPPRD sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah melakukan rekonsiliasi dengan SKPD, Lembaga/instansi terkait baik dari pusat dan daerah serta stakeholders lainnya untuk meningkatkan pengolahan data Penerimaan pada masing – masing pengelola pendapatan, selain itu dilakukan upaya pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan secara kontinyu dan evaluasi pengendalian pendapatan daerah dengan masyarakat wajib pajak agar diperoleh hasil yang optimal.			

Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2017 yang diukur dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja (perubahan) BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan target Indikator Kinerja Utama yang tertera pada RPJMD dan Perubahan Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja antara lain :

1. Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target 0,21%.
Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 sebesar 0,21%, sedangkan untuk realisasi penerimaan PAD Tahun 2017 sebesar 22,46%.
2. Transparansi, Kecepatan, Kemudahan, Akuntabilitas Pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan target sebesar 90% ini dapat diukur dari persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017, untuk pajak daerah pada tahun 2017 terealisasi sebesar 106,63% sedangkan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD (ret.gangguan / HO) terealisasi sebesar 72,60% jadi transparan kecepatan, kemudahan, akuntabilitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah terealisasi sebesar 89,62%.
3. Peningkatan kompetensi pegawai di bidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi pada tahun 2017 ditargetkan dengan target 10% , dengan peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi terealisasi sebesar 9,71%
4. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah dengan target 80%.
Indikator kinerja ini dapat diukur dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

pada Tahun 2017 dibanding dengan realisasi penerimaan denda pajak dan denda retribusi daerah yang dikelola BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 sebesar 89,62% sedangkan penerimaan denda pajak dan retribusi daerah terealisasi sebesar 64,14%.

Tidak terpenuhinya target penerimaan denda izin pajak reklame dan denda retribusi daerah hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah yang didukung oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

5. Pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah, tahun 2017 terealisasi 100% dengan capaian kinerja 111,12%.

Dari beberapa indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target 0,21% terealisasi sebesar 22,46%.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Dalam upaya mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menggerakkan aktivitas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sarana dan Prasarana terbatas, berdampak kepada Kualitas dan Kuantitas Aparatur.
2. Peraturan Perundang – Undangan tentang Pajak/ Retribusi Daerah.

Peluang yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Letak Geografis yang strategis dengan potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.
3. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Ketersediaan potensi sumber daya alam belum sepenuhnya dikelola dan bergantung kepada harga pasaran antaran *Supply* dan *Demand*, seperti halnya harga pasar dunia untuk harga Walet yang tidak stabil.

2. Sistem pengelolaan keuangan di organisasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.
3. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Adanya motivasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang didukung dengan regulasi peraturan di daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan.

Peluang/potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, apalagi kalau didukung oleh Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, ditunjang dengan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tupoksi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan kewenangan dan ketersediaan anggaran dan sarana yang ada untuk meningkatkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Diterapkannya sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah, memadainya aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah baik kualitas maupun kuantitas, serta meningkatkan peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menghadapi berbagai tantangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran agar dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan berbagai kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan yang diprioritaskan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
 KABUPATEN TANJUNGPINANG BARAT

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	3.290.406.582
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	31.100.000
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	332.100.000
06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	425.020.000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	47.192.500
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	326.325.082
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya barang cetakan dan pengoperasian	12 bulan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengoperasian	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya barang cetakan dan pengoperasian	12 bulan	320.520.000
15	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	15.143.000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya surat kabaharajalah	12 bulan	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya surat kabaharajalah	12 bulan	30.000.000
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya makan minum rapat, jamuan tamu, petugas pilot pelayanan	12 bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya makan minum rapat, jamuan tamu, petugas pilot pelayanan	12 bulan	39.000.000
28	Penyediaan Iklan Layanan	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terkaitkannya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Tanjungbar	Terkaitkannya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	1.631.000.000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terkaitkannya Iklan Layanan	100%	Penyediaan Iklan Layanan	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terkaitkannya Iklan Layanan	100%	93.000.000
13	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna perangkat daerah		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna perangkat daerah		869.245.000
20	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Kelancaran Kerja	100%	Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Kelancaran Kerja	100%	119.000.000
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terkaitkannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43 unit	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terkaitkannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43 unit	342.920.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/gedung kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terkaitkannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terkaitkannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	326.000.000
84	Pemeliharaan Administrasi Barang Inventaris Kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terkaitkannya pemeliharaan rutin/berkala peralatan/gedung kantor	12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/gedung kantor	BPPRD Kab. Tanjungbar	Terkaitkannya pemeliharaan rutin/berkala peralatan/gedung kantor	12 bulan	81.325.000
03	Peningkatan Disiplin Aparatur		Tersedianya Data Administrasi barang inventaris Kantor		Pemeliharaan Administrasi Barang Inventaris Kantor		Tersedianya Data Administrasi barang inventaris Kantor		120.300.000
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beretta Pengoperasinya	BPPRD Kab. Tanjungbar	Meningkatnya disiplin aparatur	261 stel	Pengadaan Pakaian Dinas Beretta Pengoperasinya	BPPRD Kab. Tanjungbar	Meningkatnya disiplin aparatur	261 stel	120.300.000

No	Rencana Awal RKCPD				Hasil Analisis Keberhasilan				Kebutuhan Dana (Rp)	Cetakan Pendang	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kompetensi ASN	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Di dua Provinsi dan Luar Provinsi Jambi	Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan	100%	15.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kompetensi ASN	10	15.000.000	
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya terbit administrasi perangkat daerah dan pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekrutasi pendataan daerah		739.860.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya terbit administrasi perangkat daerah dan pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekrutasi pendataan daerah		739.860.000	
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitisar Realisasi Kinerja	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya penyusunan laporan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintahan	12 bulan 4 trw	104.300.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitisar Realisasi Kinerja	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya penyusunan laporan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintahan	12 bulan 4 trw	104.300.000	
16	Rekrutasi Penempatan SKPD Pungktada	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Rapat Rekrutasi Penempatan Daerah dengan SKPD	12 Bulan	118.860.000	Rekrutasi Penempatan SKPD Pungktada	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Rapat Rekrutasi Penempatan Daerah dengan SKPD	12 Bulan	118.860.000	
21	Rekrutasi Penempatan dan Pungktada PBB P2	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Rekrutasi Penempatan dan Pungktada PBB P2	2 kali	121.910.000	Rekrutasi Penempatan dan Pungktada PBB P2	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Rekrutasi Penempatan dan Pungktada PBB P2	2 kali	121.910.000	
33	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Penyusunan Renja dan RKA SKPD	1 Duk Renja 2 Duk RKA	106.300.000	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Penyusunan Renja dan RKA SKPD	1 Duk Renja 2 Duk RKA	106.300.000	
34	Pengolahan Data Penempatan Daerah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya Data Penempatan Daerah yang akurat dan akurat	12 buku lap	204.870.000	Pengolahan Data Penempatan Daerah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tersedianya Data Penempatan Daerah yang akurat dan akurat	12 buku lap	204.870.000	
34	Penatausahaan dan Pembulukan Penempatan Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya administrasi yang teratur dan terbit	12 Bulan	84.600.000	Penatausahaan dan Pembulukan Penempatan Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya administrasi yang teratur dan terbit	12 Bulan	84.600.000	
06	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat kesialan penerimaan PAD		8.466.263.000	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat kesialan penerimaan PAD		8.466.263.000	
53	Evaluasi Penempatan PBB-P2	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Penempatan PBB P2	6 M	722.590.000	Evaluasi Penempatan PBB-P2	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Penempatan PBB P2	6 M	722.590.000	
54	Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB - P2	13 Kecamatan	Tertindakannya Verifikasi Data Objek dan Subjek PBB - P2	7000 OP	136.300.000	Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB - P2	13 Kecamatan	Tertindakannya Verifikasi Data Objek dan Subjek PBB - P2	7000 OP	136.300.000	
78	Verifikasi dan Validasi Pelayaran BPH/PTB	13 Kecamatan	Tertindakannya Verifikasi data objek BPH/PTB	700 OP	309.600.000	Verifikasi dan Validasi Pelayaran BPH/PTB	13 Kecamatan	Tertindakannya Verifikasi data objek BPH/PTB	700 OP	309.600.000	
51	Koordinasi Peningkatan Penempatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Koordinasi Peningkatan Penempatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	16 Kali	168.960.000	Koordinasi Peningkatan Penempatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Koordinasi Peningkatan Penempatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	16 Kali	168.960.000	
60	Pelaporan Penempatan Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	12 bulan	82.900.000	Pelaporan Penempatan Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	12 bulan	82.900.000	
60	Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2	Kuala Tunggal	Tertindakannya Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2	1 kali	104.560.000	Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2	Kuala Tunggal	Tertindakannya Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2	1 kali	104.560.000	
62	Koordinasi Penempatan Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya koordinasi Pendapatan Daerah	12 bln	86.017.000	Koordinasi Penempatan Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tanjungbar	Tertindakannya koordinasi Pendapatan Daerah	12 bln	86.017.000	
46	Pendataan dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Tertindakannya Pendataan WP dan WR	6300 WPWR	121.286.000	Pendataan dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Tertindakannya Pendataan WP dan WR	6300 WP	121.286.000	
49	Penilaian dan Penetapan Pajak / Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Tertindakannya penyempurnaan kelengkapan daerah dan retribusi daerah	10800 SPTPD	113.250.000	Penilaian dan Penetapan Pajak / Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Tertindakannya penyempurnaan kelengkapan daerah dan retribusi daerah	10.300 SPTPD	113.250.000	
50	Pengalihan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Tertindakannya pengalihan pajak/retribusi daerah	10300 WP	563.366.000	Pengalihan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Tertindakannya pengalihan pajak/retribusi daerah	10300 WP	563.366.000	
52	Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2	13 Kecamatan	Tertindakannya pendataan Wajib Pajak PBB-P2	7000 OP	362.375.000	Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2	13 Kecamatan	Tertindakannya pendataan Wajib Pajak PBB-P2	7000 OP	362.375.000	

No	Rancangan Awal RKPPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lebak	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1											
56	Pengkleinan Data Sistem Informasi PBB-P2	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya Pengkleinan Data Sistem Informasi PBB-P2	12 Bulan	413.200.000	Pengkleinan Data Sistem Informasi PBB-P2	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya Pengkleinan Data Sistem Informasi PBB-P2	12 Bulan	413.200.000	
57	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	13 Kecamatan	Tertindakannya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	100%	177.700.000	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	13 Kecamatan	Tertindakannya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	100%	177.700.000	
58	Penyampaian dan Pengisian PBB P2	13 Kecamatan	Penyampaian SPPT dan Pengisian PBB-P2 BPHHTB	110000 SPPT 700 BPHHTB	588.300.000	Penyampaian dan Pengisian PBB P2	13 Kecamatan	Penyampaian SPPT dan Pengisian PBB-P2 BPHHTB	110.000 SPPT 700 BPHHTB	588.300.000	
79	Pengkleinan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya data berbasis sistem informasi pengelolaan Pajak yang efektif, transparan dan akurat	12 Bulan	215.000.000	Pengkleinan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya data berbasis sistem informasi pengelolaan Pajak yang efektif, transparan dan akurat	12 Bulan	215.000.000	
66	Penyusunan Target Penarikan Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya target Penarikan Pendapatan Daerah	2 kali	145.480.000	Penyusunan Target Penarikan Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya target Penarikan Pendapatan Daerah	2 kali	145.480.000	
81	Komputerisasi Pajak Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya Peningkatan Jaringan Komputerisasi Perpajakan	100%	866.000.000	Komputerisasi Pajak Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya Peningkatan Jaringan Komputerisasi Perpajakan	100%	866.000.000	
77	Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar / 13 Kecamatan	Tertindakannya Kajian Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	100%	1.528.100.000	Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar / 13 Kecamatan	Tertindakannya Kajian Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	100%	1.528.100.000	
82	Pengkleinan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Peningkatan Pendapatan Daerah	100%	331.450.000	Pengkleinan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Peningkatan Pendapatan Daerah	100%	331.450.000	
63	Peningkatan Kualitas SOM Pengelola Pendapatan Daerah	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Jambi	Tertindakannya Peningkatan Kemampuan Pengelola Pajak	100%	170.000.000	Peningkatan Kualitas SOM Pengelola Pendapatan Daerah	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Jambi	Tertindakannya Peningkatan Kemampuan Pengelola Pajak	100%	170.000.000	
	Penyuluhan Pajak Daerah	13 Kecamatan	Tertindakannya Penyuluhan Pajak Daerah	750WP	279.200.000	Penyuluhan Pajak Daerah	13 Kecamatan	Tertindakannya Penyuluhan Pajak Daerah	750 WP	279.200.000	
66	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	100%	92.500.000	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	100%	92.500.000	
	Intensifikasi dan Efektivitas Pajak Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya kegiatan intensifikasi & Efektivitas Pajak Daerah	2 kali rakor	189.900.000	Intensifikasi dan Efektivitas Pajak Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya kegiatan intensifikasi & Efektivitas Pajak Daerah	2 kali rakor	189.900.000	
	Identifikasi dan penilaian individu pada objek pajak PBB-P2	13 Kecamatan	Tertindakannya Penilaian PBB-P2 dan Objek Pajak Bangunan Khusus	100 CP	138.300.000	Identifikasi dan penilaian individu pada objek pajak PBB-P2	13 Kecamatan	Tertindakannya Penilaian PBB-P2 dan Objek Pajak Bangunan Khusus		138.300.000	
72	Peayaran Mobil Keling PBB-P2	Kecamatan Tugohil Ulu, Kecamatan Batang Asan, Kecamatan Beton, Kecamatan Irim, Kecamatan Merang, Kecamatan Merau Pegadaik, Kecamatan Penghaman, Kecamatan Tabing	Tertindakannya peayaran mobil keling PBB P2	8 mac 64 kali	112.900.000	Peayaran Mobil Keling PBB-P2	Kecamatan Tugohil Ulu, Kecamatan Batang Asan, Kecamatan Beton, Kecamatan Irim, Kecamatan Merang, Kecamatan Merau Pegadaik, Kecamatan Penghaman, Kecamatan Tabing	Tertindakannya peayaran mobil keling PBB P2	8 mac 64 kali	112.900.000	
75	Penyusunan Statistik Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya informasi Data Statistik Pendapatan Daerah	100%	147.250.000	Penyusunan Statistik Pendapatan Daerah	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya informasi Data Statistik Pendapatan Daerah	100%	147.250.000	
64	Peayaran dan Pengadministrasian Benda Bernagya	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya Peayaran dan Pengadministrasian Benda Bernagya	12 Bulan	267.850.000	Peayaran dan Pengadministrasian Benda Bernagya	BPPRD Kab. Tangjahbar	Tertindakannya Peayaran dan Pengadministrasian Benda Bernagya	12 Bulan	267.850.000	
	Peningkatan SOM untuk Gerakan Masyarakat Taat Pajak	Kuala Tugohil	Tertindakannya peatihan untuk kadar penyuluhan pajak daerah	15 Orng	95.000.000	Peningkatan SOM untuk Gerakan Masyarakat Taat Pajak	Kuala Tugohil	Tertindakannya peatihan untuk kadar penyuluhan pajak daerah		95.000.000	
Jumlah					13.501.088.582	Jumlah					13.501.088.582

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, masalah utama yang harus mendapat perhatian adalah aspek penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses Pengelolaan Keuangan Daerah harus dituangkan terlebih dahulu.

Penerimaan secara konstitusi terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah secara maksimal antara lain :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait
2. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Daerah
3. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui kegiatan sosialisasi
4. Terus berupaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

TABEL IL-4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KABUPATEN TANJUNGPURA BARAT

NAMA SKPD : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1	Penyuluhan Pajak Daerah	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Penyuluhan Pajak Daerah	750 WP	
2	Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Data WP/WR yang up to date	6.300 WP/WR	
3	Pemilahan dan Penetapan Pajak/Retribusi Daerah	Kab. Tanjung Barat	Tercapainya Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah	10.300 SPTPD/ SKPD/SKRD	
4	Pengalihan Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Tanjung Barat	Tercapainya Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah	10.300 WP	
5	Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Data Wajib Pajak PBB-P2 yang akurat	7.000 OP	
6	Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Data BPHTB	700 OP	
7	Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB P2	Kab. Tanjung Barat	Tersedianya Data PBB P2	7.000 OP	
8	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan WP	100%	
9	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Kab. Tanjung Barat	Tercapainya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	
10	Penyempurnaan dan Pengalihan PBB P2	Kab. Tanjung Barat	Tercapainya Penerimaan PBB P2	110.000 SPPT	
11	Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2	Kab. Tanjung Barat	Tercapainya Penerimaan PBB-P2	100%	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dan amanat undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dari unsur pokok yang terdapat kewenangan, antara lain unsur pendapatan daerah, tentunya akan menjadi tanggung jawab seluruh aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan sekaligus untuk memberikan inspirasi, motivasi, inisiatif, kreatifitas serta pedoman di dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL.
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi penerimaan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah	Tingkat kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah Transparansi, kecepatan, kemudahan, akuntabilitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah Peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah Pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah	5,1 % 95% 15% 90% 95%

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Penyediaan Iklan Layanan

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5. Penataan Administrasi Barang Inventaris Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2
4. Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas/Badan
5. Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
6. Penatausahaan dan Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

F. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyuluhan Pajak Daerah
2. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah / Retribusi Daerah
4. Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
5. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah
6. Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2
7. Evaluasi Penerimaan PBB-P2
8. Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB-P2
9. Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2
10. Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah

11. Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
13. Penyampaian dan Penagihan PBB P2
14. Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2
15. Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah
16. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah
17. Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
18. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
19. Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah
20. Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2
21. Penyusunan Statistik Pendapatan Daerah
22. Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah
23. Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB
24. Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah
25. Komputerisasi Pajak Daerah
26. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah
27. Peningkatan SDM untuk Gerakan Masyarakat Taat Pajak
28. Identifikasi dan Penilaian Individu pada Objek Pajak PBB-P2

TABEL 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wajib								
3.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Berjalannya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar</i>			2.656.523.189				3.948.480.600
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat		12 Bulan	Rp 11.100.000	APBD		12 Bulan	37.320.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	Rp 308.100.000	APBD		12 Bulan	388.520.000
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	Rp 423.770.000	APBD		12 Bulan	510.024.000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	Rp 47.192.500	APBD		12 Bulan	56.631.000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 bulan	Rp 286.632.489	APBD		12 bulan	391.600.000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Tersedianya barang cetakan dan pengandaian		12 Bulan	Rp 57.153.200	APBD		12 Bulan	384.624.000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	Rp 25.000.000	APBD		100%	18.171.600
15	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah		12 Bulan	Rp 45.000.000	APBD		12 Bulan	36.000.000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat, jamuan tamu, pakgas piket pelayanan		12 Bulan	Rp 36.375.000	APBD		12 Bulan	46.800.000
18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi		12 Bulan	Rp 1.335.000.000	APBD		12 Bulan	1.957.200.000
28	Penyediaan Iklan Layanan	Terlaksananya Iklan Layanan		100%	Rp 81.300.000	APBD		100%	111.600.000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna perangkat daerah</i>			791.845.000				1.043.084.000
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kelancaran Kerja			Rp	APBD			-
20	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100%	Rp 57.120.000	APBD		100%	142.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
22	Pemeliharaan Rutin/Sefeka Kendaraan Dinas/ Operasional	Teraksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		43 unit	Rp 360.100.000	APBD		43 unit	411.504.000
26	Pemeliharaan rutin berkala peralatan/gedung kantor	Teraksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan/gedung kantor		100%	Rp 305.250.000	APBD		100%	391.200.000
84	Penilaian Administrasi Barang Inventaris Kantor	Tersedianya Data Administrasi barang Inventaris Kantor		12 Bulan	Rp 88.375.000	APBD		12 Bulan	97.580.000
03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			139.500.000				144.360.000
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Teraksananya pembelian pakaian dinas dan seragam untuk PNS, TKS/TKK		261 stel	Rp 139.500.000	APBD		261 stel	144.360.000
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi ASN			15.000.000				18.000.000
57	Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	Teraksananya Pendidikan dan Pelatihan		100%	Rp 16.000.000	APBD		100%	18.000.000
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi perangkat daerah dan Pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah			717.360.000				887.832.000
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Teraksananya penyusunan laporan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintahan		12 bulan 4 trw	Rp 84.650.000	APBD		12 bulan 4 trw	125.160.000
16	Rekonsiliasi Penilaian SKPD Pengelola Pendapatan Daerah	Teraksananya Rapat Rekonsiliasi Penilaian Daerah dengan SKPD		12 Bulan	Rp 126.900.000	APBD		12 Bulan	142.656.000
	Rekonsiliasi Penilaian dan Plutang PBB P2	Teraksananya Rekonsiliasi Penilaian dan Plutang PBB P2		2 kali	Rp 136.750.000	APBD		2 kali	146.292.000
21	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas	Teraksananya Penyusunan Renja dan RKA SKPD		1 Dok Renja 2 Dok RKA	Rp 86.650.000	APBD		1 Dok Renja 2 Dok RKA	126.360.000
33	Pengolahan Data Penilaian Pendapatan Daerah	Tersedianya Data Penilaian Pendapatan Daerah yang akurat dan akurat		12 buku lap	Rp 208.525.000	APBD		12 buku lap	245.844.000
34	Penatausahaan dan Pembukuan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah	Teraksananya administrasi yang teratur dan tertib		12 Bulan	Rp 73.475.000	APBD		12 Bulan	101.520.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kenalkan penerimaan PAD			6.518.828.000				10.159.538.800
53	Evaluasi Penerimaan PBB-P2	Tertindakannya Penerimaan PBB-P2		6 M	Rp 714.360.000	APBD		6 M	887.072.000
54	Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB - P2	Tertindakannya Verifikasi Data Objek dan Subjek PBB - P2		7000 OP	Rp 120.750.000	APBD		7000 OP	163.560.000
78	Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB	Tertindakannya Verifikasi data objek BPHTB		700 OP	Rp 240.300.000	APBD		700 OP	371.520.000
51	Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	Tertindakannya Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah		16 kali	Rp 197.368.000	APBD		16 kali	202.740.000
	Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Tertindakannya Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah		12 bulan	Rp 80.375.000	APBD		12 bulan	99.480.000
60	Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2	Tertindakannya Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2		1 kali	Rp 94.185.000	APBD		1 kali	125.472.000
62	Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Tertindakannya koordinasi Pendapatan Daerah		12 bln	Rp 128.200.000	APBD		12 bln	102.020.400
48	Pendaftaran dan Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tertindakannya Pendaftaran WP dan WR		6300 WP	Rp 82.875.000	APBD		6300 WP	145.543.200
49	Penilaian dan Penetapan Pajak / Retribusi Daerah	Tertindakannya penyampaian ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah		10.300 SPTPD/SKPD/SKR	Rp 96.425.000	APBD		10300 SPTPD/SKPD/SKR	135.900.000
50	Pemagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Tertindakannya pemagihan pajak/retribusi daerah		10300 WP	Rp 460.460.000	APBD		10300 WP	676.026.000
52	Pendataan dan Pemeliharaan Data Objek dan Subjek PBB-P2	Tertindakannya pendataan Wajib Pajak PBB-P2		7000 OP	Rp 261.400.000	APBD		7000 OP	422.850.000
55	Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2	Tertindakannya Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2		12 Bulan	Rp 380.575.000	APBD		12 Bulan	485.840.000
57	Pemfiksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Tertindakannya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah		100%	Rp 186.400.000	APBD		100%	213.240.000
59	Penyampaian dan Penghasilan PBB P2	Penyampaian SPT dan Penghasilan PBB-P2 BPHTB		110.000 SPPT 700 BPHTB	Rp 543.125.000	APBD		110.000 SPPT 700 BPHTB	645.980.000
79	Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah	Tertindakannya data berbasis sistem informasi Pengelolaan Pajak yang efektif, transparan dan akurat		12 Bulan	Rp 267.800.000	APBD		12 Bulan	258.000.000
66	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya target Penerimaan Pendapatan Daerah		2 kali	Rp 149.680.000	APBD		2 kali	174.576.000
81	Komputerisasi Pajak Daerah	Tertindakannya Peningkatan Jaringan Komputersasi Perpajakan			Rp -	APBD		100%	1.038.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
77	Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kajian Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah		100%	Rp 1.507.150.000	APBD		100%	1.833.720.000
82	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah			Rp -	APBD		100%	397.740.000
63	Peningkatan Kualitas SCM Pengelola Pendapatan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Pengelola Pajak Daerah		100%	Rp 50.000.000	APBD		100%	204.000.000
	Penyuluhan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah		750 WP	Rp 224.750.000	APBD		750 WP	335.040.000
56	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah		100%	Rp 98.700.000	APBD		100%	111.000.000
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi & Ekstensifikasi Pajak Daerah		2 kali rakor	Rp 188.800.000	APBD		2 kali rakor	227.880.000
	Identifikasi dan penilaian individu pada objek pajak PBB-P2	Terlaksananya Penilaian PBB-P2 dan Objek Pajak Bangunan Khusus			Rp -	APBD		100 OP	163.560.000
72	Pelayanan Mobil Keling PBB-P2	Terlaksananya pelayanan mobil keling PBB P2		8 kec 64 kali	Rp 131.850.000	APBD		8 kec 64 kali	135.480.000
75	Penyusunan Statistik Pendapatan Daerah	Tersampainya Informasi Data Statistik Pendapatan Daerah			Rp -	APBD		100%	176.700.000
64	Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	Terlaksananya Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga		12 Bulan	Rp 304.700.000	APBD		12 Bulan	321.420.000
	Peningkatan SDM untuk Gerakan Masyarakat Taat Pajak	Terlaksananya pelatihan untuk kader penyuluh pajak daerah			Rp -	APBD		15 Orang	114.000.000
					10.839.056.189				16.201.316.200

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, maka program untuk tahun 2019 ini, penyusunan program pembangunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	APBD
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	APBD
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	APBD
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	APBD
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	APBD
10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	APBD
11	Penyediaan Iklan Layanan	APBD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	APBD
13	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	APBD



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Beringin Telp/Fax (0742) 22402

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 0.1 / BPPRD/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 ;
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kepala BPPRD | Ketua |
| 2. Sekretaris BPPRD | Sekretaris I |
| 3. Kasubbag PEPP | Sekretaris II |
| 4. Kabid Pendapatan Asli Daerah | Wakil Ketua I |
| 5. Kabid PBB-P2 dan BPHTB | Wakil Ketua II |
| 6. Kabid Pembukuan dan Pelaporan | Wakil Ketua III |
| 7. Kabid Pengembangan dan Pendapatan | Wakil Ketua IV |
| 8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 9. Kasubbag Keuangan | Anggota |
| 10. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan (PAD) | Anggota |
| 11. Kasubbid Penilaian dan Penetapan Bidang (PAD) * | Anggota |
| 12. Kasubbid Penagihan dan Keberatan (PAD) | Anggota |
| 13. Kasubbid Pendataan dan Pengukuran (PBB) | Anggota |

14. Kasubbid Perhitungan, Verifikasi dan Penetapan (PBB)	Anggota
15. Kasubbid Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	Anggota
16. Kasubbid Pelaporan dan Benda Berharga	Anggota
17. Kasubbid Pembukuan dan Verifikasi	Anggota
18. Kasubbid Dana Transfer	Anggota
19. Kasubbid Perencanaan Pendapatan	Anggota
20. Kasubbid Pengkajian dan Pengembangan Potensi	Anggota
21. Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua mempunyai tugas mengkoordinir dan meneliti penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;
 - b. Wakil Ketua I mempunyai tugas membuat rumusan rencana kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Lingkup Bidang PAD;
 - c. Wakil Ketua II mempunyai tugas membuat rumusan rencana kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Lingkup Khusus Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. Wakil Ketua III mempunyai tugas membuat rumusan rencana kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Lingkup Pembukuan dan Pelaporan PAD dan Dana Transfer;
 - e. Wakil Ketua IV mempunyai tugas membuat rumusan rencana kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Lingkup Bidang Pengembangan dan Pendapatan melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - f. Sekretaris mempunyai tugas melakukan persiapan serta proses penyusunan dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir rencana kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;
 - g. Anggota mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sesuai dengan Lingkup Bidang masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
 Pada Tanggal : 4 Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



